

KEKUATAN *JOKOWI EFFECT* DALAM PEMENANGAN PASANGAN PRABOWO-GIBRAN PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANYUMAS

Meyliana Zahrani, Ahmad Sabiq, Neneng Sobibatu Rohmah
Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman
meyliana.zahriani@unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bagaimana *Jokowi Effect* melalui kekuatan simboliknya dapat mempengaruhi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, yang ditandai dengan adanya perubahan yang signifikan melalui kemenangan Prabowo-Gibran di wilayah yang menjadi basis partai tertentu. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana *Jokowi Effect* melalui kekuatan politik simbolik dan *non-electoral* dari Jokowi sebagai presiden petahana dapat mempengaruhi kemenangan kandidat tertentu dan mengubah peta politik di wilayah Kabupaten Banyumas. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi lapangan, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana *Jokowi Effect* melalui keuntungan petahannya dan pencapaian kebijakannya dapat mempengaruhi preferensi pemilih di Banyumas untuk berpihak pada Prabowo-Gibran yang dianggap kontinuitas dari Jokowi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efek Jokowi pada Pilpres 2024 di Kabupaten Banyumas signifikan terhadap kemenangan Prabowo-Gibran di Banyumas. Melalui teori keuntungan petahana, Jokowi mengalokasikan sumber daya kekuasaannya secara implisit melalui distribusi bantuan sosial, framing media, jejaring sosial politik, dan keterlibatan aparatur negara yang ia punya untuk memberi sinyal kepada ahli warisnya. Studi ini menekankan bagaimana kepuasan masyarakat Banyumas dan pencapaian kebijakan strategis Jokowi ditransfer pengaruhnya kepada kandidat yang dianggap keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Temuan ini memperkuat pemahaman bagaimana keterlibatan secara tidak langsung seorang petahana dapat mengubah peta politik lokal meskipun ia tidak mencalonkan diri kembali. Melalui penelitian ini dapat memperkaya literatur terutama untuk memahami presiden petahana yang tidak menjabat lagi mempengaruhi dinamika persaingan calon presiden di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Jokowi Effect*, Pilpres 2024, Banyumas, Keuntungan Petahana

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan wujud demokrasi di Indonesia. Pemilu bukan hanya sebagai ajang kompetisi antar calon kandidat, tetapi didalamnya juga terdapat berbagai dinamika kekuasaan. Salah satunya pada proses tahapannya terdapat berbagai figur politik yang memiliki kekuatan terhadap arus berjalannya tahapan pemilu yang dipengaruhi oleh faktor *track record*, pemberitaan media baik

media sosial maupun media massa, jejaringan politik, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap figur tersebut (Cahyono, 2021). Oleh karena itu, figur politik memiliki kekuatan non-elektoral yang berpengaruh terhadap kemenangan kandidat atau partai politik tertentu.

Pelaksanaan Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu Paslon 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar yang didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didukung oleh Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, dan beberapa partai non-parlemen. Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD didukung oleh PDIP, PPP, serta partai-partai politik lainnya. Berdasarkan keputusan KPU menetapkan Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024 dengan total perolehan 96.214.691 suara, mengalahkan pesaingnya setelah Prabowo tiga kali gagal dalam pilpres sebelumnya. Kemenangan ini memicu perdebatan mengenai dinamika elektoral pada Pilpres 2024, mengenai pembentukan koalisi, dan peran program kesejahteraan era Jokowi terhadap preferensi pemilih.

Kontestasi Pilpres 2024 menyajikan hal yang cukup berbeda dimana wilayah-wilayah basis dari PDIP seperti Jawa Tengah justru dimenangkan oleh Prabowo-Gibran atas Ganjar-Mahfud sebagai paslon yang diusung oleh PDIP. Jawa Tengah kini menjadi provinsi keempat yang memberikan suara terbanyak kepada Prabowo-Gibran. Melanjutkan dinamika tersebut, perubahan peta politik juga terlihat di tingkat lokal, khususnya Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas turut menyumbang kemenangan pada pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Padahal selama ini Banyumas juga dikenal sebagai basis dominasi dari PDIP. Kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 di Banyumas kontras dengan hasil Pilpres 2014 dan 2019, dimana pada saat itu PDIP terlihat dominan dengan hasil menang telak 74,26 persen suara pada Pilpres 2019 (KPU Kabupaten Banyumas, 2019). Kemenangan PDIP pada Pilpres 2014 dan 2019 di Kabupaten Banyumas menunjukkan kuatnya loyalitas ideologis partainya. Oleh karena itu, perubahan hasil Pilpres 2024 melalui kemenangan Prabowo-Gibran di Banyumas yang semula identik dengan basis PDIP menjadi menarik untuk dibahas secara lebih mendalam.

Perubahan ini turut dipengaruhi oleh isu keretakan internal PDIP dengan Jokowi, yang menyebabkan pergeseran dukungan antara kubu Jokowi dan Megawati (Hamdi dkk., 2024). Isu keretakan internal PDIP ini membuat terpecahnya basis suara PDIP kala itu. Isu ini semakin memanas ketika Gibran yang merupakan putra sulung

Jokowi dicalonkan sebagai wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Melalui pencalonan Gibran ini menjadi simbol kontinuitas agenda kebijakan Jokowi itu sendiri.

Jokowi meskipun secara konstitusional tidak dapat mencalonkan diri lagi, tetapi ia masih dianggap sebagai tokoh sentral dalam politik di Indonesia (Fieda, 2024). Hal ini menggambarkan posisinya sebagai presiden *incumbent* yang masih mempertahankan pengaruh politiknya terutama dalam mempengaruhi kepemimpinan politik di masa mendatang. Meskipun Jokowi tidak secara resmi memberikan dukungannya terhadap kandidat tertentu, tetapi terlihat dari sinyal simbolis yang mencolok. Media kemudian menyebutkan fenomena ini dengan sebutan *Jokowi Effect*. *Jokowi Effect* dalam penelitian ini dipahami sebagai kekuatan politik non-elektoral yang berasal dari Presiden Jokowi yang memiliki kekuatan dalam kontestasi Pilpres 2024 meskipun tidak mencalonkan diri (Fieda, 2024).

Dalam konteks Kabupaten Banyumas, *Jokowi Effect* tidak hadir secara eksplisit melainkan secara implisit melalui pandangan masyarakat yang positif terhadap Jokowi, narasi keberlanjutan, pemberitaan media, distribusi kebijakan populis, dan mobilisasi relawan atau jejaring politik lokal yang diasosiasikan dengannya. Dalam konteks ini, *Jokowi Effect* melalui pengaruhnya sebagai presiden petahana digunakan untuk memastikan keberlanjutan kebijakannya yang menjadi motivasi baginya untuk menentukan pilihannya. Jokowi dengan popularitas dan kepuasan publik yang tinggi dilihat dari kinerjanya selama dua periode kepemimpinannya, berada dalam posisi unik untuk dapat mempengaruhi preferensi pemilih dan dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Melalui koordinasi dengan Jokowi sebagai presiden petahana, Prabowo secara efektif menggunakan sisa dukungan publik terhadap petahana menjadi dukungan elektoral yang baru. Terlebih lagi dalam pemilu tanpa petahana, pemilih seringkali mengandalkan penilaian retrospektif yang mempertimbangkan kinerja masa lalu dan janji-janji di masa depan (Putra dkk., 2025)

Berbagai dinamika pada Pilpres 2024 tersebut, dapat ditinjau melalui beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama oleh Asfar, dkk. (2025) menyusun model mengenai Jokowi Effect sebagai bentuk *incumency advantage*, dimana Jokowi sebagai presiden petahana yang tidak mencalonkan diri kembali mengalokasikan kekuasaan, sumber daya politik untuk dapat meningkatkan ekuitas petahana sekaligus memberi sinyal kepada ahli warisnya. Ditambahkan oleh Sutrisno & Linda Tunaerah (2024) menyoroti transfer pengaruh politik petahana dalam proses elektoral

kepada calon penerusnya yang memiliki kedekatan personal bahkan biologis. Dilanjutkan oleh Marcus Mietzner (2024) yang membahas mengenai aliansi pragmatis dukungan Jokowi ke Prabowo dalam memenangkan Pilpres 2024, yaitu guna menjamin keberlanjutan pengaruhnya. Penelitian ini diperdalam oleh Putra, dkk (2025) menunjukkan keberhasilan pemerintahan Jokowi memengaruhi preferensi pemilih untuk memilih Prabowo yang disimbolkan sebagai kontinuitas Jokowi. Fieda (2024) memperluas analisis mengenai peran dari figur politik yang memainkan peran penting guna mengarahkan dukungan masyarakat melalui modal politik yang ia punya guna memastikan keberlanjutan kebijakan pemerintahannya.

Kajian diatas signifikan dalam memahami *Jokowi Effect* dari sudut pandang teoretik dan nasional. Penelitian ini menawarkan ide kebaharuan dalam menganalisis *Jokowi effect* dengan memfokuskan pada dinamika politik lokal yang belum ditelusuri lebih dalam pada penelitian sebelumnya yang hanya berfokus di level nasional. Saat ini, belum ada yang membahas mengenai bagaimana *Jokowi Effect* melalui kemenangan Prabowo-Gibran turut mempengaruhi perubahan hasil pilpres di daerah-daerah yang secara historis menjadi basis PDIP seperti Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini berargumen bahwa *Jokowi Effect* berpengaruh dalam Pilpres 2024, yang membawa kandidat yang didukungnya untuk memenangkan kontestasi. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kekuatan politik simbolik dan *non-electoral* dari Jokowi sebagai presiden petahana dapat menjadi kekuatan dalam pemenangan pasangan tertentu dan merubah arah peta politik di wilayah Kabupaten Banyumas. Fenomena ini memunculkan adanya pertanyaan mendasar bagaimana kekuatan *Jokowi Effect* dalam pemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 di Kabupaten Banyumas. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kekuatan figur sentral seperti Jokowi di konteks lokal dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya pada Pilpres tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menerapkan metode studi lapangan (*research field*). Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk melakukan penyelidikan dan memahami masalah sosial berdasarkan pada gambaran yang holistik yang dibentuk dengan kata-kata melalui pandangan informan secara terperinci dan lengkap

(Ismayani, 2019). Sumber-sumber informasi ini didapatkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara mendalam yang melibatkan beberapa informan seperti tokoh masyarakat, loyalis Jokowi, partai politik, penyelenggara pemilu, aparat negara (TNI dan kepala desa), purnawirawan, media lokal, relawan Prabowo-Gibran maupun Ganjar-Mahfud, serta beberapa masyarakat. Sumber sekunder sebagai penunjang berasal dari berbagai literatur yang relevan, seperti artikel ilmiah, laporan media yang dapat memberikan gambaran komperhensif tentang topik yang diteliti.

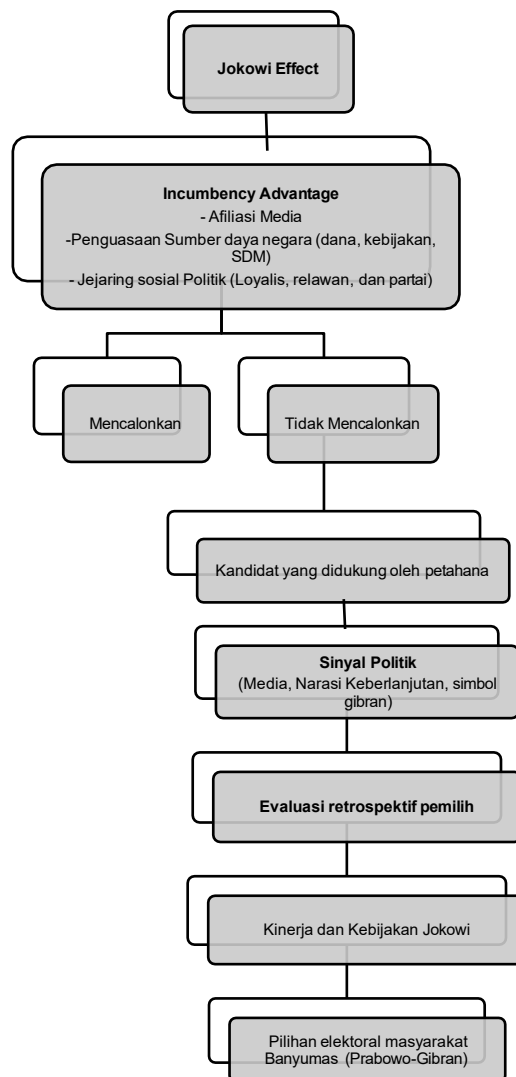
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi menurut Heidegger & Gadamer adalah pendekatan yang mengkaji dan menyelidiki peristiwa kehidupan manusia dalam kerangka pemikiran dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan yang dipahami atau dipikirkan individu itu sendiri (M. Lavery, 2003). Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data interaktif oleh Huberman & Miles (Lubis, 2018). Analisis data interaktif membantu peneliti dalam menganalisis data yang sudah didapatkan agar menjadi sistematis. Analisis data interaktif dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk dapat memastikan kredibilitas penelitian dilakukan strategi melalui keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi Sumber yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber untuk dapat memverifikasi temuan dan mengidentifikasi perbedaan perspektif.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu: Teori efek petahana, teori pemungutan suara retrospektif dan teori sinyal.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti

Teori *Incumbency Advantage* (Keuntungan Petahana)

Seorang pemimpin yang sedang menjabat sering kali memanfaatkan posisinya untuk dapat mempertahankan kekuasaan yang ia miliki, terlebih lagi ketika posisinya sebagai seorang pemimpin petahana. Sebagai pemimpin petahana ia memiliki Keuntungan Petahana (*incumbency advantage*) yang dapat digunakan untuk membangun posisi electoral mereka agar lebih kuat dibandingkan lawan-lawannya. Keuntungan petahana pertama kali dijelaskan dijelaskan oleh David Mayhew dalam bukunya *Congress The Electoral Connection* yang merujuk pada keuntungan elektoral yang dinikmati seorang kandidat karena statusnya sebagai petahana yang memiliki akses terhadap sumber daya negara, jaringan media, dan dukungan lainnya yang

memungkinkan mereka untuk dapat mempertahankan kekuasaannya. Teori keunggulan petahana yang dijelaskan oleh David Meyhew (1974) biasanya dikaitkan dalam konteks petahana yang mencalonkan diri kembali. Sementara penelitian yang dilakukan, petahana tersebut hanya mengadopsi keunggulan petahana dalam dimensi untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya untuk menciptakan pengaruh dalam konteks elektoral.

Menurut Jacobson (2021) ketika seorang petahana tidak lagi memiliki syarat untuk mencalonkan diri lagi, maka dukungan politik bergeser kepada wakil presiden ataupun kandidat yang dianggap memiliki kedekatan dengan petahana seperti kandidat yang berasal dari partai politik yang sama. Petahana biasanya berasal dari elit atau pemimpin partai sehingga dapat memperkuat efek ke kandidat tersebut. Namun penelitian ini mengkontraskan tersebut, *pertama* wakil presiden dari petahana tidak berpartisipasi dalam pemilihan, *kedua* efek limpahan petahana tidak menguntungkan kandidat yang satu partai politik tetapi kandidat lain, jadi keunggulan petahana digunakan untuk memperkuat prospek elektoral bagi kandidat lain. Argumen dari teori keunggulan petahana yang digunakan adalah oleh Asfar, dkk (2025) bahwa keunggulan petahana melalui alokasi sumber dayanya digunakan untuk mempertahankan warisan kepemimpinan mereka dan menciptakan transfer suara yang menguntungkan kandidat tertentu.

Teori Pemungutan Suara Retrospektif

Teori pemungutan suara retrospektif yang dijelaskan oleh James Campbell, dkk (2010) menyatakan bahwa pemilih mendasarkan suara mereka pada kinerja dari kandidat di masa lalu dalam menjalankan pemerintahan, apabila tingkat kepuasan tinggi biasanya akan berdampak positif bagi petahana. Campbell (1983) menyebutkan bahwa kredibilitas dan kualitas petahana yang didapatkan melalui faktor seperti kebijakan yang dimiliki, hubungan dengan media, dan kinerja dalam meningkatkan ekonomi menjadi indikator penting. Melalui keunggulan inilah yang menyebabkan petahana memiliki tingkat persetujuan publik yang menguntungkan bagi mereka untuk dipilih kembali.

Melalui pengalaman kebijakan di masa lalu dapat memberikan ekspektasi yang lebih realistis tentang partai atau kandidat mana yang akan lebih menguntungkan mereka, selain itu melalui ekspektasi masa depan ini akan berpengaruh terhadap pilihan pemilih (Fiorrini, 1978). Pengakuan tersebut terkait

kebijakan strategis yang akan meningkatkan tingkat persetujuan dan kepuasan publik terhadap pemerintah. Premis ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang tinggi terhadap petahana akan dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih kembali atau tidak pada pemilihan berikutnya. Walaupun ia tidak memenuhi syarat untuk dipilih kembali, akan tetapi memungkinkan mereka untuk lebih mendukung kandidat yang dianggap sebagai kelanjutan dari petahana tersebut. Melalui teori ini dapat menjelaskan bagaimana pemilih dimotivasi oleh keinginan untuk kontinuitas dan mengaitkan kepemimpinan dari petahana dengan penerus pilihannya.

Teori Sinyal

Teori sinyal menurut Matthew Eshabaugh-Soha (2005) dipahami sebagai bentuk petunjuk atau isyarat yang dikirimkan untuk mengomunikasikan pesan melalui pernyataan, tindakan, atau informasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan dukungan atau penolakan terhadap suatu ide, partai, atau tokoh sehingga agenda tersebut dapat terjadi. Sinyal tersebut biasanya disampaikan oleh individu yang memiliki legitimasi yang cukup kuat sehingga pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi opini publik. Biasanya, isyarat yang dikirim oleh presiden petahana dengan tingkat dukungan publik yang tinggi lebih berpengaruh daripada isyarat yang dikirim oleh presiden yang tidak populer. Keuntungan yang dinikmati oleh kandidat yang didukung oleh petahana ini kemudian di transfer pengaruhnya melalui sinyal politik. Hal ini karena seorang presiden petahana di Indonesia dilarang secara terbuka untuk mendukung kandidat tertentu, sehingga efek petahana tersebut dilakukan secara simbolik melalui sinyal politik. Sinyal ini jika dikirim oleh presiden petahana dengan tingkat dukungan publik yang tinggi lebih berpengaruh daripada isyarat yang dikirim oleh presiden yang tidak populer.

PEMBAHASAN

1. Kondisi Politik Kabupaten Banyumas pada Pilpres 2024

Kabupaten Banyumas sejak lama dikenal sebagai daerah 'merah' atau basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini tercermin dari hasil pemilu eksekutif 2014 serta 2019 maupun pemilu legislatif. Pada Pilpres 2014, Jokowi-Jusuf Kalla yang diusung oleh PDIP mendominasi dengan perolehan suara 613.226 atau 63,91 persen dibandingkan lawannya Prabowo-Hatta hanya 346.345 suara atau 36,09

persen (KPU Kabupaten Banyumas, 2014). Pada Pilpres 2019 kemenangan Jokowi terulang, bersama rekannya yaitu Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 792.150 atau 74,26 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya memperoleh 274.618 suara atau 25,74 persen (KPU Kabupaten Banyumas, 2019).

Kemenangan PDIP baik di Pilpres dua kali berturut-turut maupun Pileg menunjukkan wilayah ini relatif stabil dan sulit digeser, terlebih lagi dengan kuatnya loyalitas ideologis masyarakat. Loyalitas ideologis masyarakat didasarkan pada personifikasi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang dianggap sebagai ruh dari Bung Karno oleh masyarakat Banyumas. Adanya slogan PDIP sebagai '*partainya wong cilik*' semakin memperkuat dukungan simpatisan dan pemilih PDIP. Selain slogan partainya, peningkatan dukungan terhadap PDIP di Banyumas juga disebabkan karena popularitas kadernya, salah satunya Joko Widodo yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat kecil. Kekuatan PDIP di Banyumas ini bahkan diungkapkan oleh simpatisan lawan politik Jokowi sebagai berikut:

"Kalo Banyumas sendiri PDI nya masih kuat, sehingga memang luar biasa susah banget untuk digeser dari 2014 dan 2019. Disini wilayah kecamatan yang jadi basis PDIP ada di Purwokerto Timur, Cilongok, terus Gumelar, Ajibarang, daerah itu jadi basis PDI." (S. Nugraha, wawancara pribadi 18 September 2025)

Kondisi politik pada saat Pilpres 2024 hasilnya diluar dugaan yaitu dengan kemenangan dari Prabowo-Gibran di wilayah Kabupaten Banyumas. Perolehan suara Prabowo-Gibran di Kabupaten Banyumas yaitu 558.230 atau 48,91 persen dibandingkan Ganjar-Mahfud hanya 35,94 persen dari total pengguna hak pilih 1.146.961 (KPU Kabupaten Banyumas, 2024).

Tabel 1

Hasil Pilpres 2019 dan 2024

Pilpres 2019		
Kandidat	Jokowi-Ma'ruf	Prabowo-Sandiaga
Total perolehan suara	792.150	274.618
Total kemenenangan wilayah	27 Kecamatan di Banyumas	-
Wilayah tertinggi perolehan suara:	1. Cilongok: 61.411 2. Ajibarang: 49.821 3. Sumbang: 42.667	1. Cilongok: 14.982 2. Kembaran: 14.626 3. Sokaraja: 14.289
Pilpres 2024		
Kandidat	Prabowo-Gibran	Ganjar-Mahfud
Total perolehan Suara	558.230	412.138
Total kemenenangan wilayah	24 Kecamatan di Banyumas	3 Kecamatan di Banyumas

Wilayah	1. Cilongok: 37.260	1. Gumelar: 15.533
tertinggi/kemenangan	2. Sumbang: 31.312	2. Pekuncen: 20.503
perolehan suara:	3. Sokaraja: 30.021	3. Ajibarang: 29.908

Keterangan. Data Sekunder KPU Kabupaten Banyumas

Kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 di Banyumas ini menunjukkan adanya pergeseran pada peta politik di Kabupaten Banyumas. Adanya perpecahan antara PDIP dan Jokowi juga semakin membuat basis massa Banyumas tidak sepenuhnya lagi mendukung PDIP. Isu perpecahan antara PDIP dan Jokowi terjadi karena ketidaksamaan ide maupun pandangan antara Megawati selaku ketua umum PDIP dan Jokowi (Mietzner, 2024). Perpecahan semakin tajam ketika Koalisi Indonesia Maju menyatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dengan adanya perpecahan ini memungkinkan Jokowi memanfaatkan sumber daya incumbent nya untuk membentuk aliansi baru.

Pencalonan Gibran yang dipasangkan dengan Prabowo menjadi salah satu bentuk sinyal dukungan Jokowi pada saat itu. Dengan naik nya Gibran semakin memperkuat isyarat bahwa Jokowi sedang menetapkan agenda agar kesinambungan dari pemerintahannya terjadi. Hal ini dinyatakan juga oleh loyalisnya di Banyumas.

“Pada dasarnya pak Jokowi tidak menginginkan terjadinya Prabowo-Gibran, awalnya Jokowi menginginkan Prabowo dipasangkan dengan Ganjar sebagai pertimbangan bahwa negaranya ini butuh keberlanjutan walaupun berganti kepemimpinan. Tapi ini tidak terjadi, sehingga di injury time pak Jokowi mengizinkan Gibran maju mendampingi Prabowo dan itu merupakan keputusan sangat berat bagi beliau, tetapi sekali lagi mempertimbangkan kepentingan bangsa.” (T.A. Wibowo & Teguh, wawancara pribadi 16-20 September 2025)

Wacana Gibran sebagai Wapres yang mendampingi Prabowo muncul setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar-Pranowo menjadi RI 1 dan Mahfud MD yang akan mendampinginya. Keputusan ini membuat Jokowi merasa kecewa karena dirinya dianggap tidak dilibatkan dalam beberapa keputusan penting PDIP. Akhirnya penetapan Gibran dilakukan setelah adanya konsolidasi dukungan relawan Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Loyalis Jokowi di Banyumas yakin dengan dipasangkannya Gibran dengan Prabowo maka Indonesia akan lebih maju dan keberlanjutan akan terus berjalan.

Terpilihnya Gibran sebagai calon wapres yang akan mendampingi Prabowo, membuat PDIP merasa dianggap “dikhianati”, mereka sakit hati dan kecewa terhadap keputusan politik pada saat itu, hal ini juga diungkapkan oleh DPC PDIP di Banyumas

“Kita sama sekali ga ada pikiran Gibran bakal dicalonkan sebagai cawapres karena beberapa minggu sebelum deklarasi dia masih tegak lurus ikut intruksi partai, jadi kecewanya pasti ada lah.” (A. Suprpto, wawancara pribadi 29 September 2025)

Kader-kader PDIP bahkan hingga ditingkat daerah seperti di Banyumas menyuarkan penolakan terhadap Gibran. Hal ini karena pengaruh *Jokowi Effect* di wilayah Kabupaten Banyumas membuat PDIP di Banyumas merasa kewalahan untuk menyeimbangkan kekuatannya, terlebih lagi melalui sumber daya incumbent yang Jokowi miliki. Keuntungan *incumbent* yang ia punya berupa legitimasi kinerja yang memperkuat dukungan masyarakat, dan kontrol terhadap sumber daya negara (Campbell J. E., 1983). Terlebih lagi dengan sosok Jokowi dimata masyarakat Kabupaten Banyumas yang semakin mempengaruhi pertimbangan pilihan politik dari masyarakat sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Tokoh masyarakat di Banyumas yaitu

“Jokowi dianggap sebagai presiden yang berhasil oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Branding beliau yang sederhana, perhatian terhadap rakyat, dan suka berbagi lewat bansos, dapat mudah diterima oleh karakteristik masyarakat Banyumas menengah kebawah yang masih mempertimbangkan keuntungan ekonomi.” (B. Widodo, wawancara pribadi 16 September 2025)

Ditambah lagi, Banyumas dikenal sebagai daerah yang cukup positif terhadap pembangunan dari pemerintahan Jokowi. Pada akhir masa kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan di Banyumas menjadi sorotan dari Jokowi yang membuat masyarakat Banyumas merasa puas dengan kinerja Jokowi. Menurut Key dalam Asfar., dkk (2025) melalui kinerja dalam kebijakan strategis ini akan meningkatkan tingkat persetujuan dan kepuasan publik terhadap pemerintah. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kubu 02 melalui penggunaan ‘narasi keberlanjutan’ dari program Jokowi. Melalui ‘narasi keberlanjutan’ keberhasilan kebijakan strategis Jokowi ditransfer secara politis ke pasangan Prabowo-Gibran.

Fenomena ini menunjukkan melemahnya loyalitas ideologis masyarakat itu sendiri, masyarakat saat pada saat itu bukan lagi hanya berpatokan pada ideologis partai saja, tetapi sudah bergeser untuk melihat figur atau isu yang dianggap relevan. Dalam teori *incumbency advantage* menunjukkan petahana yang memiliki keunggulan struktural dalam hal ini kepercayaan atau dukungan publik yang tinggi yang mempengaruhi perilaku memilih untuk menentukan kandidat selanjutnya (Campbell J. E., 1983, pp. 5-6). Walaupun dirinya tidak mencalonkan diri kembali, pengaruh *incumbency* tersebut tetap bekerja melalui transfer legitimasi dan kepercayaan publik

terhadap kandidat yang diasosiasikan sebagai penerusnya. Kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi selama dua periode kepemimpinannya berpindah kepada pasangan Prabowo-Gibran yang dianggap sebagai penerusnya. Secara kritis, fenomena ini menunjukkan bahwa *Jokowi Effect* tidak hanya menentukan arah pilihan politik masyarakat Banyumas, tetapi juga membentuk pola baru demokrasi yang lebih berorientasi pada kinerja dan personalitas pemimpin dibandingkan dengan loyalitas ideologis partai.

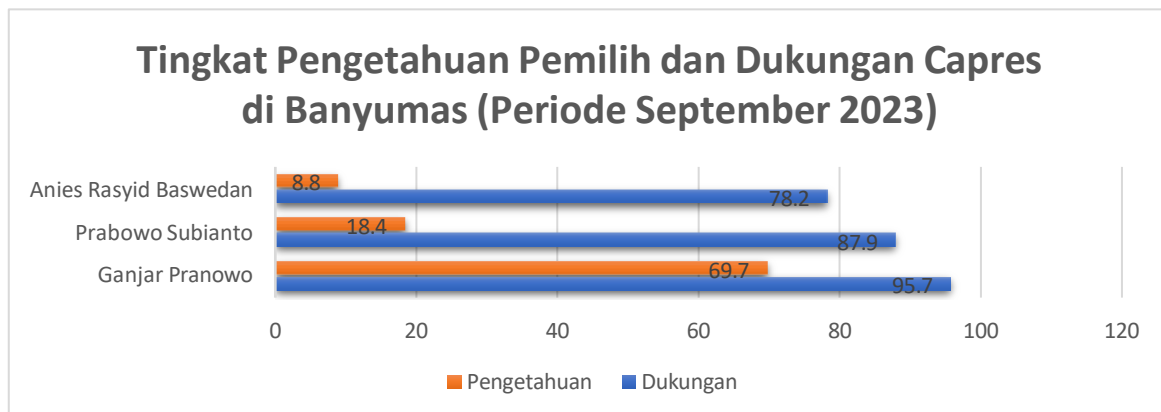
2. *Jokowi Effect* dalam Dinamika Politik Banyumas

Fenomena yang muncul pada Pilpres 2024 yaitu *Jokowi Effect*, yang memiliki kekuatan dalam mengarahkan dukungan dan pilihan masyarakat secara tidak langsung melalui sumber daya politik *incumbent* nya walaupun dirinya secara konstitusional tidak dapat mencalonkan diri kembali. Posisinya sebagai presiden petahana, Jokowi memiliki keunggulan karena memiliki akses terhadap sumber daya negara. Penelitian ini memberikan kontribusi argumen baru bahwa keuntungan petahana bukan hanya dapat digunakan ketika petahana tersebut mencalonkan diri kembali, tetapi bisa digunakan ketika petahana tersebut tidak mencalonkan diri lagi dan dialihkan ke kandidat lain. Efek ini akan tetap ada dan bisa ditransfer ke kandidat yang didukungnya melalui sinyal-sinyal politik tersirat.

Jokowi Effect jika dilihat dalam konteks lokal yaitu pengaruh yang dimiliki oleh presiden petahana yang sifatnya non-elektoral dan simbolik melalui jejaring sosial politik, distribusi kebijakan populis, hubungan dengan media. Campabel (2010) menyebutkan bahwa petahana memiliki kesempatan untuk lebih diakui kredibilitas dan kualitasnya melalui faktor seperti kebijakan yang dimiliki, kinerja dalam meningkatkan ekonomi, maupun hubungan dengan media, hal inilah yang menjadi asset popularitas dan persetujuan publik bagi petahana. Dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi yang tinggi, menjadi bahan pertimbangan ketika Gibran dicalonkan menjadi wakil presiden bersama Prabowo. Gibran inilah yang menjadi simbol regenerasi politik Jokowi yang mampu menarik suara pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi. Dapat dilihat dari survei elektabilitas dukungan masyarakat Banyumas sebelum Gibran dideklarasikan (Pandawa Research, 2023).

Gambar 2

Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Capres di Banyumas

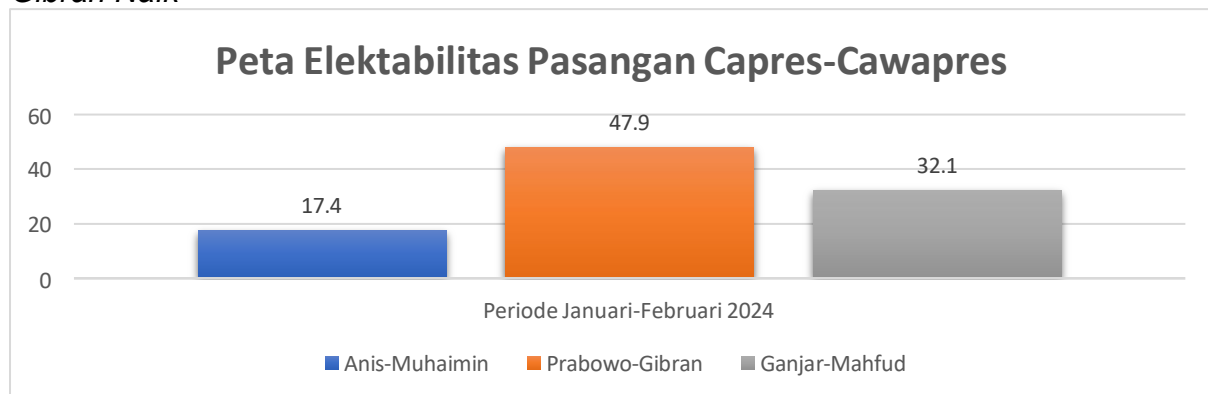


Keterangan. Survei Pandawa Research 2023

Setelah deklarasi Gibran sebagai wakil Prabowo, elektabilitas Prabowo-Gibran cenderung diatas Ganjar-Mahfud (Navigator Research, 2024). Kenaikan elektabilitas ini karena adanya migrasi pemilih, yang mana Gibran sebagai putra Jokowi menarik simpatisan Jokowi di PDI-P untuk mendukung Prabowo. Pergeseran dukungan ini menunjukkan transfer dukungan retrospektif dari Jokowi ke Prabowo-Gibran, dimana masyarakat melihat pasangan ini sebagai kontinuitas dari pemerintah.

Gambar 3

Data Elektabilitas Capres-Cawapres di Banyumas Periode Januari-Februari/Pasca Gibran Naik



Keterangan. Survei Navigator Research 2024

Penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden juga tidak terlepas dari adanya pro kontra ditengah masyarakat Banyumas. Menurut Widodo (wawancara pribadi 15 September 2024) selaku tokoh masyarakat Kabupaten Banyumas, pandangan masyarakat yang kontra beranggapan bahwa penetapan Gibran dianggap kurang tepat, karena dianggap masih kurang kompeten dan sarat nepotisme tidak terlepas dari campur tangan Jokowi dan pamannya Anwar Usman. Pandangan masyarakat Banyumas yang pro beranggapan bahwa Gibran menjadi simbol regenerasi politik

Jokowi. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

“Gibran kalo bukan anaknya Jokowi ga mungkin untuk dipilih, Gibran ini sebagai penentu masyarakat untuk memilih karena dianggap sebagai representasi dari kelanjutan Jokowi.” (B. Widodo, Wawancara pribadi 15 September 2025)

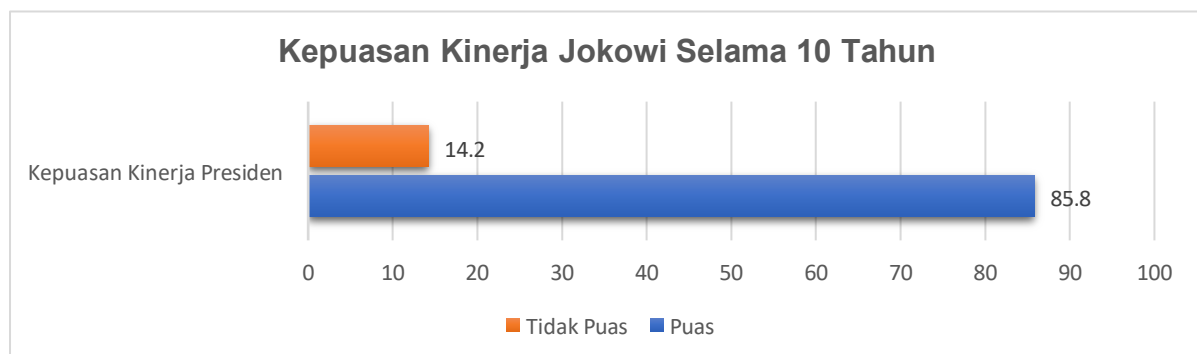
Masyarakat melihat dan menerima sosok Gibran hanya sebagai simbol regenerasi politik Jokowi dibandingkan melihat Gibran sebagai tokoh muda yang memiliki agenda politik sendiri. Tim pemenangan menyebutkan bahwa, mereka cenderung menggunakan popularitas Jokowi untuk membangun legitimasi terhadap Gibran. Dalam kampanye, tim sukses Prabowo-Gibran lebih sering menampilkan Prabowo dan narasi keberlanjutan Jokowi, dibandingkan sosok Gibran itu sendiri hal ini diungkapkan sebagai berikut

“Dari tim sukses pada saat kampanye sebenarnya lebih sering fokus ke Prabowonya dengan narasi Pak Prabowo itu trah Banyumas. Kita semakin diuntungkan karena adanya dukungan dari pak Jokowi yang memecah suara PDIP. Terlebih lagi dengan adanya narasi keberlanjutan itu juga sangat membantu kita untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat.” (S. Nugraha wawancara pribadi 18 September 2025)

Keterlibatan Jokowi secara tidak langsung dalam Pilpres 2024 ini menunjukkan bahwa ia masih dianggap sebagai sosok yang penting terutama sebagai *vote gatter*. Walaupun pada akhir masa kepemimpinannya, ia tidak menjadi *“lamb duck”* dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi yang cenderung tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil dari Survei Indikator yang memperlihatkan kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap kinerja Jokowi (Survei Indikator, 2023). Melalui survei ini dapat juga menggambarkan kepuasan masyarakat Banyumas yang menjadi bagian dari wilayah Jawa Tengah.

Gambar 4

Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi



Keterangan. Survei Indikator 2023

Masyarakat Banyumas merasa puas terhadap beberapa kebijakan strategis Jokowi dalam hal kebijakan ekonomi maupun pembangunan. Dalam teori pemungutan suara retrospektif pemilih mengevaluasi kinerja kandidat di masa lalu, apabila tingkat kepuasan tinggi biasanya akan memberikan efek positif bagi petahana (Campbell dkk., 2010, pp. 2-3). Dengan tingkat kepuasan masyarakat Banyumas yang tinggi terhadap kinerja Jokowi, akan menjadikan ekuitas keunggulan petahana ini dapat ditransfer ke calon kandidat lain. Kepuasan atas kinerja tersebut kemudian dijadikan dukungan elektoral baru, dalam hal ini meningkatkan persetujuan terhadap pasangan Prabowo-Gibran yang dianggap sebagai 'kelanjutan dari pemerintahan Jokowi'. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Banyumas yang tinggi dapat berkontribusi dalam menentukan preferensi pemilih terhadapnya, walaupun petahana tersebut tidak mencalonkan diri kembali, akan memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk mendukung kandidat yang dianggap sebagai penggantinya.

Melalui kepuasan masyarakat yang positif ini 'cawe-cawe' yang dilakukan oleh Jokowi pada saat itu memiliki kekuatan besar dalam konteks kemenangan salah satu pasangan. Cawe-cawe ini diartikan sebagai bentuk keterlibatan presiden secara tidak langsung dalam proses pemilihan dengan tujuan untuk memastikan bahwa presiden selanjutnya akan sesuai dengan kriteria yang diharapkan (Hamdi dkk., 2024). Kekuatan *Jokowi Effect* pada kemenangan Pasangan Prabowo-Gibran dilakukan melalui sinyal-sinyal politik tertentu sebagai penggerak untuk mengarahkan dukungan dan preferensi masyarakat melalui strategi dan penggunaan sumber daya incumbennya. Dalam Pilpres 2024 ini, Prabowo-Gibran secara strategis menggunakan sisa-sisa dukungan tersebut yang memicu adanya pergeseran pemilih untuk mengikuti sinyal dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran.

Jokowi Effect dalam kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 di Kabupaten Banyumas memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk keputusan politik masyarakat Kabupaten Banyumas. Melalui kepuasan masyarakat yang positif terhadap kepemimpinannya, citranya di mata masyarakat, dan adanya simbol kontinuitas melalui sosok Gibran, berpotensi menarik pemilih khususnya menengah ke bawah untuk mendukung kandidat yang ia dukung. *Jokowi Effect* dalam konteks di Kabupaten Banyumas dilakukan melalui kekuatan simbolik seperti melalui jaringan sosial politik, pemberitaan media, distribusi kebijakan populis, dan adanya manuver atau tekanan yang dilakukan oleh aparat TNI, Polri bahkan kepala desa turut serta dalam mobilisasi massa untuk menyukseskan Prabowo-Gibran di Banyumas.

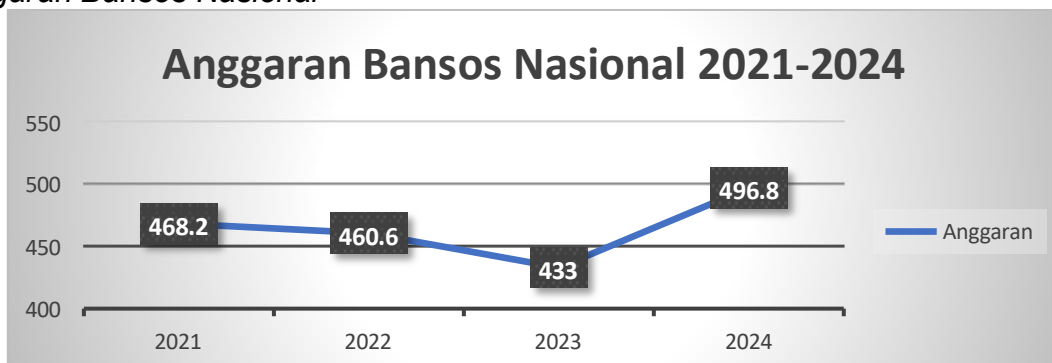
3. Manifestasi *Jokowi Effect* dalam Pemenangan Prabowo–Gibran di Kabupaten Banyumas

3.1 Distribusi Bansos Menjelang Pilpres 2024 di Kabupaten Banyumas

Sebagai presiden petahana, Jokowi memiliki akses terhadap sumber daya negara salah satunya akses terhadap anggaran untuk kebijakan strategis yang dimilikinya. Kebijakan strategis ini biasanya berkaitan dengan kebijakan pembangunan maupun ekonomi. Salah satu kebijakan strategis Jokowi selama periode kepemimpinan yaitu Bantuan Sosial (Bansos) yang dikenal sebagai kebijakan populis. Dalam konteks Indonesia bansos sering dimanfaatkan oleh politisi untuk kepentingan politiknya baik di tingkat lokal maupun nasional (Syahadat dkk., 2024). Sebagai pelaksana kebijakan, alokasi bansos menjelang Pilpres 2024 dilakukan guna memperkuat ingatan masyarakat terhadapnya dan memberi sinyal kepada publik mengenai dukungan ke kandidat selanjutnya.

Gambar 5

Anggaran Bansos Nasional



Keterangan. Sumber Kompas 2024

Menjelang Pilpres 2024, Jokowi pada saat itu gencar mendistribusikan bansos di beberapa daerah, seperti di Jawa Tengah termasuk Banyumas. Banyumas menjadi salah satu wilayah dengan penerima bansos terbanyak se-Jawa Tengah (Primadi, 2023). Jumlah total kepala keluarga penerima bansos di Banyumas sebanyak 240.659 dengan total alokasi dana keseluruhan mencapai Rp577.581.600 (BPS Kabupaten Banyumas, 2023).

Tabel 2

Wilayah Kecamatan Penerima Bansos Terbesar di Kabupaten Banyumas

Kecamatan	2023	
	Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Anggaran
1. Cilongok	19.151	45.962.400.000
2. Ajibarang	15.157	36.376.800.000

3. Sumbang	14.777	35.464.800.000
4. Pekuncen	12.845	30.838.000.000

Keterangan. Data sekunder BPS Kabupaten Banyumas 2023

Berdasarkan tabel diatas wilayah penerima bansos terbesar hampir jatuh kepada wilayah yang dikenal sebagai basis dari PDIP di Banyumas. Wilayah seperti Cilongok dan Sumbang, bahkan menjadi penyumbang perolehan terbesar bagi Prabowo-Gibran. Banyumas menjadi penting dan riskan bagi pasangan Prabowo-Gibran terlebih lagi dengan dominasi dari PDIP di wilayah tersebut. Hal inilah yang menjadikan alasan gempuran bansos dan kedatangan Jokowi di akhir masa kepemimpinannya ke Kabupaten Banyumas sebagai langkah menderek elektabilitas Prabowo-Gibran seperti yang diungkapkan oleh loyalis Jokowi:

“Pada saat itu, Prabowo-Gibran cukup lemah di Kabupaten Banyumas karena hitungan estimasi terakhir itu masih kurang 3%, makannya Jokowi hadir di wilayah Kabupaten Banyumas. Begitu pak Jokowi datang elektabilitas Prabowo-Gibran semakin naik. Mungkin ketika beliau beliau tidak hadir di Banyumas, suaranya tidak akan signifikan dan masyarakat memang sangat melihat hal tersebut.” (Teguh, wawancara pribadi 16 September 2025)

Pada bulan Januari 2024, Banyumas yang menjadi salah satu daerah yang dikunjungi oleh Jokowi. Pada saat itu, Jokowi memantau penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog Klahang Sokaraja, Kabupaten Banyumas sebanyak 10 Kg yang disalurkan kepada 1.000 warga kelompok penerima manfaat (KPM) pada 3 Januari 2024 (Anang, 2024). Jika melihat hasil Pilpres di wilayah tersebut, terlihat bahwa Sokaraja menjadi wilayah terbesar ketiga yang menyumbangkan perolehan suara Prabowo-Gibran dengan total 30.021 suara (KPU Kabupaten Banyumas, 2024).

Dalam hal ini kunjungan kenegaraan Jokowi ke Banyumas, dipahami sebagai bentuk mekanisme *advertising* dan *credit claiming* yang dijelaskan oleh David Mayhew dalam bukunya *Congress The Electoral Connection*. *Advertising* yakni upaya untuk membangun nama atau meningkatkan elektabilitas melalui kunjungan kenegaraan ataupun tampil di media (Mayhew, 1974, p. 52). Melalui mekanisme *advertising* tersebut dapat memperkuat ingatan publik terhadap citra kepemimpinan Jokowi yang peduli, dan memperkuat legitimasi kepercayaan publik terhadapnya. Selain itu, kebijakan bansos ini mencerminkan adanya mekanisme *credit claiming*, dimana Jokowi berusaha menunjukkan keberhasilan kebijakannya untuk dapat membangkitkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadapnya (Mayhew, 1974, p. 53). Melalui tingkat kepuasan dan kinerja dalam pemerintahannya akan membentuk

pilihan politik masyarakat. Secara eksplisit warga yang menerima bantuan merasa ada hubungan erat dengan keputusan politik yang mereka ambil. Hal ini diungkapkan oleh salah satu kepala desa di Banyumas:

“Masyarakat sini yang menikmati program bansos ini, pilihannya kenceng arahnya buat milih 02, masyarakat kan yang merasakan dan menganggapnya sebagai budi baik yang harus dibales dan berharap programnya lanjut, akhirnya kan kenceng buat milih kesana.” (S.U. Susanto, wawancara pribadi 7 Oktober 2025)

Jika dilihat, perilaku memilih masyarakat Kabupaten Banyumas didasarkan pada evaluasi retrospektif. Penilaian retrospektif ini didasarkan adanya keinginan kontinuitas dari program petahana. Walaupun petahana tidak mencalonkan diri kembali, evaluasi positif tersebut akan ditransfer kepada kandidat yang dianggap akan melanjutkan kinerja dari petahana. Melalui alokasi strategis ini Jokowi secara efektif mendorong ketergantungan pemilih terhadap pemerintahannya, sehingga meningkatkan potensi dukungan berkelanjutan. Petahana berusaha untuk menarik kembali dan memperkuat dukungan publik kepadanya dan kandidat yang didukungnya.

3.2 *Jokowi Effect* melalui Jejaring Sosial Politiknya

Kekuatan *Jokowi Effect* di Kabupaten Banyumas tidak hadir secara eksplisit melainkan secara implisit melalui loyalisnya. Hal ini karena, posisinya sebagai kepala negara dan pemerintah yang seharusnya menjaga netralitas. Kondisi ini memberikan ruang bagi penggunaan sinyal politik Jokowi melalui loyalisnya. Loyalis disini sebagai pihak yang menyampaikan dan memperkuat isyarat dukungan politik Jokowi tanpa harus melibatkan pengirim sinyal secara langsung. Sinyal politik yang disampaikan melalui loyalisnya memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi karena loyalis disini dipersepsikan memiliki hubungan kedekatan ataupun emosional dengan Jokowi. Dalam teori sinyal, efektifitas penerimaan pesan ditentukan oleh pemberi sinyal tersebut (Eshabaugh-Soha, 2005, p. 5). Ketika loyalis menunjukkan dukungan terhadap kandidat tertentu, publik akan mudah menafsirkan tindakan tersebut sebagai refleksi preferensi dukungan Jokowi sesungguhnya, meskipun dirinya tidak pernah menyatakan secara formal dukungan terhadap kandidat tersebut.

Gambar 6

Loyalis Jokowi di Banyumas (JPKP & Projo)



Keterangan. Arsip narasumber

Loyalis Jokowi di Kabupaten Banyumas sendiri masih eksis keberadaannya. Salah satu contoh keeksisan Loyalis Jokowi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada saat menjelang Pilpres 2024 yaitu dalam acara “Madep mantep 2024 bersama Jokowi,” di GOR Satria Purwokerto, dalam acara tersebut mereka mendeklarasikan akan tetap tegak lurus mengikuti arahan Jokowi pada Pilpres 2024 (Zain & Utomo, 2022).

Gambar 7

Keeksisan Loyalis Jokowi di Banyumas melalui Acara Madep Mantep



Keterangan. Arsip narasumber

Melalui acara ini menunjukkan adanya kesetiaan politik loyalis yang bersifat personalistik terhadap Jokowi, meskipun pada saat itu ada isu perpecahan antara PDIP dan Jokowi, dari sebagian besar loyalis memilih untuk mengikuti arah politik Jokowi dibandingkan partai.

“Saat ini kami relawan Jokowi semuanya masih satu komando mengikuti intruksi beliau. Pada saat pak Jokowi datang ke Banyumas dan bertemu dengan kami loyalisnya ya tujuannya untuk menguatkan barisan Prabowo-Gibran di Banyumas.” (Teguh, wawancara pribadi 16 September 2025)

Melalui loyalisnya ini bisa menjadi kekuatan penting bagi kandidat tertentu yang didukung oleh Jokowi. Hal ini karena Jokowi tidak bisa mencalonkan diri lagi sehingga memungkinkan adanya transfer dukungan loyalis Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019

ke Prabowo-Gibran. Melalui loyalis dapat membentuk opini publik di tingkat *grassroot*, dan memobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Pada saat kampanye Prabowo-Gibran di Banyumas, loyalis Jokowi menggunakan ‘narasi keberlanjutan’ pembangunan dan program strategis Jokowi. Narasi ini digunakan untuk menciptakan sinyal dukungan bahwa pasangan tersebut akan melanjutkan *legacy* dari Jokowi. Melalui loyalis ini menjadi jembatan untuk mengarahkan pemilih Jokowi pada 2014 dan 2019 untuk beralih dukungan ke Prabowo-Gibran. Salah satu penyelenggara pemilu mengungkapkan, bahwa di lapangan penggunaan narasi keberlanjutan dianggap cukup efektif untuk dijual ke masyarakat dalam mengkampanyekan Prabowo-Gibran di Banyumas

“Penggunaan nama besar Jokowi melalui narasi keberlanjutannya lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah yang menerima manfaat konkrit dari kinerja Jokowi seperti pembangunan infrastruktur maupun bantuan bantuan sosial memang terasa betul di masyarakat Banyumas. Melalui narasi keberlanjutan, Prabowo-Gibran ataupun tim nya memanfaatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat Banyumas untuk beralih mendukung mereka.” (H. Ersu, wawancara pribadi 5 November 2025)

Partai politik yang berkoalisi dengan Prabowo-Gibran salah satunya Partai Gerindra di Banyumas juga mengintruksikan kepada Tim Sukses Prabowo-Gibran untuk menggunakan narasi keberlanjutan pada saat kampanye.

“Ada intruksi untuk menggunakan narasi keberlanjutan, karena melihat realita di masyarakat dibawah yang puas dengan pak Jokowi, sehingga kita ngomongnya kita akan melakukan perbaikan-perbaikan agar lebih baik lagi seterusnya.” (Imanda, wawancara pribadi 4 November 2025)

Hal ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi selama masa kepemimpinannya mempunyai peran penting dalam menentukan pilihan masyarakat untuk mendukung Prabowo-Gibran. Citra diri Jokowi juga dirawat oleh loyalis di *grassroot* sehingga pandangan masyarakat tentang figur Jokowi akan terus identik dengan pemimpin yang peduli dengan masyarakat kecil. Narasi dan citra inilah yang kemudian di transfer ke kandidat lain, sehingga muncul dukungan masyarakat terhadap kandidat tersebut. Melalui narasi tersebut akan memberikan ingatan psikologis pada masyarakat bahwa pasangan Prabowo-Gibran ini akan melanjutkan program-program dari Jokowi.

3.3 Jokowi Effect dan Framing Media

Kekuatan *Jokowi Effect* juga terbentuk melalui media massa. Dalam kontestasi politik, media memiliki peran penting dalam membentuk pandangan publik terhadap figur politik atau kandidat tertentu. Melalui framing pemberitaan ini, apa yang melekat pada figur Jokowi tersebut akan melekat pada kesadaran kolektif masyarakat yang tidak akan terhapus begitu saja (Sudarmika dkk., 2023). Dalam konteks keunggulan petahana, Jokowi sebagai petahana memiliki afiliasi dengan media untuk memperkuat pencapaiannya dan memanfaatkan media tersebut sebagai sarana untuk memperluas pengakuan publik (Meyhew, 1974, p. 52). Afiliasi dengan media ini, terlihat dari salah satu media lokal di Banyumas yang secara tidak langsung juga turut terlibat dalam mendukung Prabowo-Gibran melalui pemberitaannya.

"Kalau pemberitaan kita bergantung sama politik redaksi kita, karena redaksi surat kabar kami itu jadi TKD Prabowo-Gibran dan ini berpengaruh secara tidak langsung ke konten-konten pemberitaan yang muncul mengenai pasangan Prabowo-Gibran di Banyumas." (A. Wahyudi, wawancara pribadi 10 November 2025).

Contoh pemberitaan media lokal di Kabupaten Banyumas yang dapat mempengaruhi persepsi publik yaitu pemberitaan yang menyoroiti adanya perpindahan basis massa PDIP ke Prabowo-Gibran atas dasar pertimbangan kepada personalisasi Jokowi (Susanto, 2024).

Gambar 8

Pemberitaan Media oleh Suara Merdeka



Keterangan. Berita Suara Merdeka Banyumas 2024

Pemberitaan ini menunjukkan bahwa Jokowi melalui popularitas dan legitimasinya dapat mendorong relokasi dukungan massa yang semula mendukung calon yang diusung oleh partainya sendiri dalam hal ini PDIP, beralih mengikuti sinyal

politik Jokowi dengan mendukung calon yang dinilai dapat meneruskan warisan kebijakan dari pemerintahan dalam hal ini Prabowo-Gibran. Secara teoritik fenomena ini menunjukkan bagaimana pilihan politik dari pemilih bukan hanya lagi dilandaskan pada loyalitas ideologis tetapi mempertimbangkan pada personalisasi figur politik tertentu.

Framing media juga menonjolkan berbagai momen yang menampilkan kampanye yang dilakukan oleh relawan Prabowo-Gibran. Salah satu contohnya adalah liputan dari RRI yang menyoroti kegiatan dukungan relawan Jaringan Relawan Matahari Muda Banyumas terhadap Prabowo-Gibran (Suprianto, 2024).

Gambar 9

Pemberitaan Media oleh RRI

Banyumas 1912 Deklarasikan Dukung Pasangan Prabowo-Gibran

Oleh: Suprianto Editor: Anom Andadari
12 Jan 2024 - 14:45  Purwokerto



Jaringan Relawan Matahari Muda Banyumas untuk Prabowo-Gibran mendeklarasikan Banyumas 1912 pada Jumat (12/1/2024) di Pasar Ajibarang

Dijelaskan oleh Mudiyanto, pihaknya optimis bahwa program Presiden Jokowi bakal dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Gibran.

"Kami optimis pasangan Prabowo-Gibran terpilih akan melanjutkan program Presiden Jokowi yakni pemerataan pembangunan dan memberikan kesempatan anak-anak muda dalam berkarya,"katanya.

Keterangan. Berita RRI 2024

Pemberitannya menampilkan pernyataan mengenai harapan dari relawan terhadap pasangan Prabowo-Gibran akan melanjutkan program Jokowi. Secara psikologis pemberitaan seperti ini berpengaruh terhadap pandangan publik dan memperkuat ingatan masyarakat bahwa Prabowo-Gibran sebagai bentuk kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Pemberitaan ini juga memicu mekanisme pemungutan suara retrospektif, ketika pemilih melihat kondisi ekonomi mereka terbantu dengan adanya program strategis pemerintah yang ditampilkan di media, hal ini memberikan penilaian positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Penilaian ini yang akhirnya dialihkan ke kandidat yang dianggap paling dekat dengan keberlanjutan pemerintah tersebut. Dengan demikian, media lokal ini juga menjadi arena bagi pemilih untuk membentuk persepsi tentang kandidat mana yang dianggap akan melanjutkan kinerja pemerintah.

3.4 Jokowi Effect dan Keterlibatan Aparatur Negara

Dalam konteks Pilpres 2024 di Banyumas, keberadaan aparatur negara seperti TNI, Polri, ASN menjadi aktor yang secara kelembagaan terikat pada prinsip netralitas politik, yang mana mereka tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun kecuali sudah purna tugas. Temuan di lapangan menunjukkan hal berbeda, yang mana TNI yang seharusnya hanya dibaca sebagai aktor yang menjaga keamanan formal, maupun ketahanan negara, malah menjadi entitas simbolik negara yang mempengaruhi arah dukungan masyarakat. Efek ini menguat karena pada saat itu Jokowi sebagai presiden petahana memiliki kedekatan dengan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, yang secara material dan simbolik menghadirkan TNI/Polri.

Kasus di Kabupaten Banyumas terkait keterlibatan TNI/Polri dilakukan secara implisit. Dukungan TNI/Polri kepada kandidat tertentu didasarkan pada ikatan ideologis antara aparat dengan kandidat tersebut. Hal ini diungkapkan oleh penyelenggara yang memiliki relasi sosial dengan TNI dimana

“Temen saya nontabennya TNI, dia tu bilang “nek aku si anuo wis diarahke kudu milih Prabowo” (D.S.A. Sari, wawancara pribadi 16 Oktober 2025)

Narasi “*wis diarahke*” juga memverifikasi hasil penelitian oleh Marcus Mietzner (2024) dimana aparat digunakan untuk mempromosikan pencalonan Prabowo melalui penekanan yang dilakukan oleh birokrasi. Aparat negara sebagai bagian dari struktur kekuasaan, memperlihatkan adanya bukti intruksi hierarkis yang diasosiasikan dengan kekuasaan yang sedang menjabat. Menurut Sutarman (wawancara pribadi, 31 Oktober 2025) aparat negara yang tidak memiliki hak pilih, akhirnya mengarahkan dukungan untuk memilih Prabowo-Gibran kepada yang memiliki kedekatan sosiologis yaitu keluarga ataupun orang-orang terdekat mereka.

Keterlibatan aparat dalam hal ini Babinsa/Bhabinkamtibas dilakukan secara implisit dengan menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh purnawirawan untuk mendukung Prabowo-Gibran. Purnawiran di Kabupaten Banyumas pada saat Pilpres 2024, tergabung dalam TIM 08 KPPS (Kami Pendukung Prabowo Subianto). Melalui TIM 08 KPPS ini, purnawirawan di Kabupaten Banyumas membentuk Relawan 08 MASPUR BERSIUL (Masyarakat Purnawirawan Bersinergi dengan Ulama) (TIM 08 MASPUR BERSIUL, 2024). Peran Bhabinsa/Bhabinkamtibas disini yaitu untuk mengerahkan massa di balik seperti yang diungkapkan oleh anggota KPPS 08 sebagai berikut

“Data relawan MASPUR BERSIUL ini diperoleh dari Babinsa Danramil, yang mana sebenarnya mereka mendukung cuma mungkin tidak terang-terangan apalagi masih aktif.” (Ichawandi, wawancara pribadi 2 November 2025)

Keterlibatan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga dijamin oleh salah satu partai di Kabupaten Banyumas, yang mana mereka terlibat dalam mengamankan pasangan Prabowo-Gibran di Banyumas. Militansi yang dilakukan oleh aparat negara ini sebagai bentuk kekuasaan petahana untuk memerintahkan sumber daya negara agar tujuan politiknya bisa tercapai.

“Pemilu legislatif bareng sama pilpres, sempat kita didatengin para aparat ini ngancem caleg-caleg kabupaten, dan dia pamer di mobilnya ada pelacak sinyal, jadi kalo ada komunikasi terdeteksi dari partai kami, nomer-nomer caleg diancam untuk dihapus dan ditangkap semua, dan nantinya dipaksa untuk mengkampanyekan Prabowo-Gibran. Aparat datang dengan ucapan “ini perintah bapak”, waktu itu kita sangat kesulitan karena kami kalah amunisi, kedua kalah penguasa atau kalah pengaruh.” (A. Suprpto, wawancara pribadi 29 September 2025)

Tak hanya itu keterlibatan kepala desa sebagai aparatur negara juga menjadi penguat dari *Jokowi Effect* dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Banyumas. Kepala desa dalam posisi mereka tidak diperbolehkan melakukan dukungan atau berpihak pada kandidat manapun pada saat pelaksanaan pemilu maupun pemilukada. Fenomena dukungan aparatur desa terhadap kandidat Prabowo-Gibran diawali ketika, Jokowi pada saat itu mengesahkan Revisi Undang-Undang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Kepala Desa di Banyumas

“Waktu itu kan kepala desa minta perpanjangan masa jabatan apa ya, mungkin itu yang buat dukungan kepala desa ke Prabowo-Gibran, apalagi kebijakane waktu pak Jokowi esih njabat, ya bahasane kaya bales budi lah.” (S.U. Suprpto, wawancara pribadi 7 Oktober 2025)

Dukungan kepala desa di Banyumas terhadap Prabowo-Gibran didasarkan pada penilaian retrospektif terhadap kebijakan Jokowi yang memunculkan adanya evaluasi yang positif terhadap kepemimpinannya. Dalam kerangka pemungutan suara retrospektif, evaluasi positif ini akan memberikan dampak positif bagi petahana tersebut untuk dipilih kembali (Campbell dkk., 2010, p. 3) Ketika petahana dalam hal ini Jokowi yang tidak mencalonkan diri kembali, penilaian positif tersebut kemudian dialihkan ke Prabowo-Gibran yang dianggap dapat melanjutkan dari kebijakan tersebut.

Dukungan kepala desa di Banyumas terhadap Prabowo-Gibran terlihat dari beberapa catatan relawan, misalnya salah satu anggota relawan Prabowo-Gibran dalam MASPUR BERSIUL merupakan kepala desa yang masih aktif di Kabupaten Banyumas pada saat itu (TIM 08 MASPUR BERSIUL, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepala desa kerap kali terlibat dalam bentuk kegiatan politik, walaupun tidak selalu berbentuk kampanye terbuka secara langsung, melainkan bekerja melalui pengaruh simbolik, pengkondisian sosial. Menurut Ersu (wawancara pribadi, 5 November 2025) keberpihakan beberapa kepala desa di Banyumas dilakukan secara implisit misalnya melalui percakapan informal antar warga, ataupun pemberian sinyal dukungan lewat kegiatan sosial atau pertemuan masyarakat. Salah satu contoh di Banyumas sendiri, pada saat kampanye Pilpres 2024, terdapat kasus keikutsertaan salah satu kepala desa di Banyumas dalam kampanye terbuka yang dilakukan oleh Tim Sukses Prabowo-Gibran yaitu Bolone Masse melalui kegiatan jalan sehat. Kasus ini bahkan ditangani oleh Bawaslu, namun hanya berhenti pada tahap klarifikasi karena kurangnya bukti (Bawaslu Kabupaten Banyumas, 2024).

Penutup

Jokowi Effect memiliki peran yang signifikan dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Banyumas pada Pilpres 2024 dan mengubah peta politik Kabupaten Banyumas yang menjadi basis PDIP. Meskipun PDIP mendukung pasangan Calon Ganjar-Mahfud, hasil perolehan suara di Banyumas justru dimenangkan oleh Prabowo-Gibran. Kemenangan Prabowo-Gibran di Banyumas itu bukan semata-mata karena kekuatan mesin politik atau strategi kampanye, tetapi karena adanya perpindahan kepercayaan publik dari Jokowi yang kemudian ditransfer ke Prabowo-Gibran. Banyumas yang dulu dikenal dengan basis PDIP justru menjadi contoh bagaimana pengaruh figur ini bisa menggeser orientasi politik masyarakat. *Jokowi Effect* bukan hanya fenomena politik elektoral tetapi juga cerminan dari perubahan pola pikir pemilih dari loyalitas ideologis ke loyalitas terhadap kinerja dan figur yang dianggap berhasil. Melalui citra positif Jokowi sebagai pemimpin populis yang dekat dengan masyarakat dan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerjanya menciptakan *retrospective voting*, di mana dukungan tersebut berpindah kepada kandidat yang dianggap sebagai penerus agenda Jokowi.

Jokowi secara implisit menggunakan sumber daya negara untuk mengamankan hasil politik untuk kandidat yang didukungnya. Keterlibatan simbolik yang dilakukan melalui sinyal politik, salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial untuk mendukung kandidat yang didukungnya. Melalui alokasi strategis bantuan sosial menjelang Pilpres 2024 memperkuat dukungan masyarakat kepada Prabowo-Gibran di Kabupaten Banyumas. Kehadiran bansos di wilayah-wilayah kecamatan yang dikenal sebagai basis PDIP ini sebagai strategi untuk mengganggu pemilih militan PDIP, sehingga pemilih beralih mendukung Prabowo-Gibran. Mobilisasi bantuan sosial menjadi salah satu faktor yang memperkuat pandangan masyarakat mengenai keberlanjutan kebijakan, sekaligus menciptakan rasa *balas budi* yang menguntungkan Prabowo-Gibran.

Kekuatan *Jokowi Effect* juga bekerja secara simbolik melalui jejaring sosial politik melalui loyalis ataupun partai politik yang berkoalisi dengan Prabowo-Gibran. Keuntungan petahana yang ia punya dalam hal ini digunakan secara implisit untuk memastikan kesinambungan kepemimpinannya melalui kandidat yang ia dukung. Melalui narasi keberlanjutan digunakan sebagai sinyal politik untuk mobilisasi masyarakat yang puas dan menerima manfaat konkrit dari program Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran. Melalui afiliasi dengan media lokal, media dalam hal ini berperan menampilkan citra positif Jokowi dan mengaitkannya dengan pasangan 02, sehingga memperluas efek simbolik *Jokowi Effect* dalam memengaruhi opini publik Banyumas.

Jokowi secara aktif mengirimkan sinyal kepada pemilih tentang dukungannya terhadap Prabowo-Gibran. Salah satunya menggunakan sumber daya negara berupa dukungan implisit aparatur negara seperti TNI/Polri maupun kepala desa. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk memobilisasi pilihan masyarakat untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Banyumas. Praktik ini menunjukkan bagaimana sumber daya negara diarahkan untuk menciptakan pengaruh dalam konteks elektoral. Menjadi catatan penelitian sebagai seorang aparatur negara baik ASN, TNI/Polri seharusnya tetap menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam kegiatan politik ataupun sampai berpihak secara terang-terangan untuk mendukung kandidat tertentu.

Referensi

- Asfar, A. S., Firdauz, D. L., Wicaksana, I. G., Ida, R., & Ariwibowo. (2025). Understanding the Jokowi effect during Indonesia's 2024 presidential election: an integrative model of incumbency advantage. *Journal Politics & International Relations*, 11(1), 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2484470>
- Bawaslu Kabupaten Banyumas. (2024). *Data Pelanggaran Pilpres 2024*. Bawaslu Kabupaten Banyumas.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2023). *Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2023*. BPS Kabupaten Banyumas.
- Cahyono, A. D. (2021). Pengaruh Popularitas Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kehadiran dan Preferensi Memilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(3), 3.
- Campbell, J. E. (1983). The Return of the Incumbents: The Nature of the Incumbency Advantage. *The Western Political Quarterly*, 36(3), 1–12.
<https://doi.org/10.1177/106591298303600309>
- Campbell, J. E., Dettrey, B. J., & Yin, H. (2010). The Theory of Conditional Retrospective Voting: Does the Presidential Record Matter Less in Open-Seat Elections? *The Journal of Politics*, 72(4), 1.
<https://doi.org/10.1017/S002238161000054X>
- Fieda, O. P. (2024). Peran Jokowi sebagai King Maker dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024: Analisis Strategi Politik dan Dampaknya Terhadap Konstelasi Politik Nasional. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(9), 2.
<https://doi.org/https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/3326>
- Fiorrina, M. P. (1978). Economic Retrospective Voting in American National Elections: A Micro-Analysis. *American Journal of Political Science*, 22(2), 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2110623>
- Firmansyah, A. (2024, Januari 3). *Kunjungi Gudang Bulog Sokaraja, Jokowi Bagikan Paket Sembako ke Warga*. Diakses dari detikJateng: <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7122344/kunjungi-gudang-bulog-sokaraja-jokowi-bagikan-paket-sembako-ke-warga>
- Hamdi, S., Maulana, I., Rahmawandi, I., & Fatimatuzzahro. (2024). Drama, Manuver dan Cawe-Cawe Politik Menjelang Pilpres 2024. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(4), 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56015/gjikplp.v10i4.221>
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala Press University.
- Jacobson, G. C. (2021). Driven to Extremes: Donald Trump's Extraordinary Impact on the 2020 Elections. *Presidential Studies Quarterly*, 0(0), 1–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/psq.12724>
- KPU Kabupaten Banyumas. (2014). *Dokumen Pilpres 2014 di Banyumas*. KPU Kabupaten Banyumas.
- KPU Kabupaten Banyumas. (2019). *Data Hasil Pilpres 2019*. KPU Kabupaten Banyumas.
- KPU Kabupaten Banyumas. (2024). *Data Hasil Pilpres 2024*. KPU Kabupaten Banyumas.
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian*. DeepPublish.
- M. Laverty, S. (2003). Hermeneutic Phenomenology and Phenomenology: A Comparison of Historical and Methodological Considerations. *International*

- Journal of Qualitative Method*, 2(3), 23–25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/160940690300200303>
- Mattew, E.-S. (2005). Presidential Signaling in a Market Economy. *Presidential Studies Quarterly*, 35(4), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1741-5705.2005.00273.x>
- Mayhew, D. R. (1974). *Congress The Electoral Connection*. Yale University Press.
- Mietzner, M. (2024). Jokowi's Pyrrhic Victory_ Indonesia's 2024 Elections and the Political Reinvention of Prabowo Subianto. *Journal Contemporary Southeast Asia*, 46(2), 1–29. <https://doi.org/10.1355/cs46-2a>
- Navigator Research. (2024). *Survei Elektabilitas Capres-Cawapres Pilpres 2024 di Kabupaten Banyumas*. Navigator Research.
- Pandawa Research. (2023). *Survei Tingkat Pengenalan & Kesukaan Capres*. Pandawa Research.
- Primadi, Y. I. (2023, November 30). *Penerima Bansos Kemensos di Banyumas Terbanyak seJateng dan DIY*. Diakses dari Radar Banyumas: <https://radarbanyumas.disway.id/purwokerto/read/71142/penerima-bansos-kemensos-di-banyumas-terbanyak-sejateng-dan-diy>
- Putra, C. Y., Febriani, D. A., Nugroho, A. T. C., & Dartanto, T. (2025). The Jokowi Effect on the Victory of Prabowo: Do People Vote for Continuity? *Journal Economics and Finance in Indonesia*, 71(1), 1–23. <https://doi.org/10.47291/efi.2025.04>
- Sudarmika, D., Safrudiningsih, & Suradi. (2023). PDIP dan Megawati dalam Dinamika Politik Indonesia 2014-2024. *Jurnal Visioner: Jurnal Media dan Seni*, 4(2), 65. <https://doi.org/https://doi.org/10.65873/835djs42>
- Suprianto. (2024, Januari 12). *Banyumas 1912 Deklarasikan Dukung Pasangan Prabowo-Gibran*. Diakses dari RRI: <https://rri.co.id/pemilu/513589/banyumas-1912-deklarasikan-dukung-pasangan-prabowo-gibran>
- Survei Indikator. (2023). *Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi selama 2 Periode*. Survei Indikator.
- Susanto. (2024, Januari 10). *Pendukung Ganjar Mahfud Ajibarang Pindah Haluan Dukung Prabowo Gibran*. Diakses dari Suara Merdeka: <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0911476723/pendukung-ganjar-mahfud-ajibarang-pindah-haluan-dukung-prabowo-gibran?page=2>
- Susilo, Nina. (2024, Januari 5). *Gelontoran Bansos di Tahun Pemilu*. Diakses dari Kompas: <https://www.kompas.id/artikel/gelontoran-bansos-di-tahun-pemilu>
- Sutrisno, & Tunaerah, L. (2024). Jokowi's Poltical Communication: Utilizing Social Media in Winning Gibran as Vice President of Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 1–19. <https://doi.org/10.15575/cjik.v8i2.38198>
- Syahadat, M. I., Arief, I. A., & Efrianto, L. O. (2024). Politik Pork Barrel: Bantuan Sosial Jokowi Menjelang Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Publicuho*, 7(4), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.621>
- TIM 08 MASPUR BERSIUL. (2024). *Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024*. TIM 08 Maspur Bersiul.
- Zain, F. M., & Utomo, & A. (2022, Maret 27). *3.000 Relawan Jokowi di Banyumas Berkumpul, Ada Apa?* Diakses dari Kompas.com: <https://lipsus.kompas.com/pameranotomotifnasional2024/read/2022/03/27/133559678/3000-relawan-jokowi-di-banyumas-berkumpul-ada-apa>